



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan tambahan kebutuhan regulasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
1	Kewajiban Pembangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 1
2	Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 2
3	RDTR	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 4
4	Prasarana Minimal	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 1
5	Perubahan atas Pergub No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD	TW 3 (menunggu pengesahan RPP UUCK)
6	Perubahan Atas Pergub No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
7	Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 4
8	Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 4
9	Perubahan Atas Pergub No. 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
10	Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan Sebagai Lahan Cadangan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih		V				TW 4
11	Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Banglih	V					TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
12	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	<p>1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p>	TW 1
								<p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p>	
13	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	<p>1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p> <p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p>	TW 4
14	Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU	V				<p>1. TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/028-LHP/IJ tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahap II</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p>	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
15	Pedoman Pemberian BBM	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	1. Penyesuaian Kebutuhan perangkat Daerah 2. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian BBM Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat, Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian BBM dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai	TW 1
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 2
17	Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Miilk Daerah	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Prov. DKI Jakarta 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 2
18	Pedoman Penetapan Status Penggunaan BMD	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Asset Tetap SKPD/UKPD 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 3
19	Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41	TW 4
20	Tukar Menukar Atas Barang Milik Daerah Yang Terkena Pengembangan Dan/Atau Pembebasan Lahan	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU		V				TW 4
21	Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU	V				1. Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah."	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
22	Pemberian Rekomendasi HGB di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU				V	<p>1. Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”</p> <p>2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset yang berbunyi: “Pelaksanaan penelitian dan analisis pasar properti serta pelayanan konsultasi dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk penggunaan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, pemanfaatan aset infrastruktur untuk menara seluler, jaringan mikrosel dan reklame.”</p>	TW 4
23	Pengelolaan Menara Seluler dan Infrastruktur di Atas Ruang dan/atau di Bawah Ruang Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengeloan Aset Daerah	EKU	V				<p>1. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset yang berbunyi: “Pelaksanaan penelitian dan analisis pasar properti serta pelayanan konsultasi dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk penggunaan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, pemanfaatan aset infrastruktur untuk menara seluler, jaringan mikrosel dan reklame.”</p>	TW IV

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
24	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame	Badan Pengelolaan Aset Daerah	EKU	V				1. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset Daerah yang berbunyi: "Pelaksanaan penelitian dan analisis pasar properti serta pelayanan konsultasi dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk penggunaan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan, pemanfaatan aset infrastruktur untuk menara seluler, jaringan mikrosel dan reklame."	TW 4
25	Kemitraan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	EKU	V				Menindaklanjuti Perda Provinsi DKI Jakarta No.2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Pada Pasal 42 ayat 10 dan Pasal 55 ayat 9 diamanatkan agar dibenuk Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan pola kemitraan a. Bahwa dalam upaya memperkuat dan memantapkan ekonomi daerah, khusus pada bidang usaha perpasaran diperlukan adanya pemberdayaan dan kemitraan usaha yang kokoh antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM/IKM b. Bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan UMKM/IKM melalui Kemitraan Usaha	TW4
26	Kawasan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	EKU	V				Bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui penyelenggaraan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara lebih optimal, profesional dan berkesinambungan serta dapat terintegrasi dengan kepariwisataan	TW4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
27	Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	EKU			V		Revisi Pergub No. 10 Tahun 2015 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini	TW 4
28	Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Pembuatan Sebelum Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	EKU	V				Delegasi kewenangan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2021	TW 1
29	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		KSD	TW 1
30	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		KSD	TW 1
31	Penerbitan dan Penyampaian Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik	Badan Pendapatan Daerah	EKU	V				KSD	TW 2
32	Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
33	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/ Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan PNS	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	TW 2
34	Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Nasionnal Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)	Badan Pendapatan Daerah	EKU	V				Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	TW2
35	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan NJOP Sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 2
36	Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	EKU	V				Amanat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan	TW 1
37	Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun 2021	Badan Pendapatan Daerah	EKU	V				Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
38	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah	TW 1
39	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019	TW 1
40	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019	TW 2
41	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Rekomendasi Inspektorat	TW 2
42	Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	EKU			V		Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Untuk Keperluan Laporan Korsupgah KPK	TW 2
43	Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pendapatan Daerah (Bappenda)	EKU	V					TW 4
44	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Badan Pendapatan Daerah (Bappenda)	EKU	V					TW 4
45	Pemotongan Hewan Kurban	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
46	Pengembangan Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	EKU	V				Tindak Lanjut Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018-2030	TW3
47	Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan harga murah untuk masyarakat tertentu	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	EKU			V		Terjadi perubahan komoditas dan kelompok penerima manfaat	TW 2
48	Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi	Dinas Kebudayaan	Pemkes	V				Amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi	TW 1
49	Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Dinas Kebudayaan	Pemkes	V				Amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	TW 1
50	Perubahan Atas Pergub Nomor 45 Tahun 2018 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia	Dinas Sosial	Pemkes		V			Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia Daerah	TW 3
51	Perubahan Atas Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak	Dinas Sosial	Pemkes			V		Permensos Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	TW 1
52	Layanan Lanjut Usia	Dinas Sosial	Pemkes	V				Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota	TW 4
53	Layanan Anak	Dinas Sosial	Pemkes	V				Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota	TW 4
54	Tim PIPA	Dinas Sosial	Pemkes	V				Pergub DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
55	Karang Taruna	Dinas Sosial	Pemkes			V		Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna	TW 1
56	SDM Kesos	Dinas Sosial	Pemkes	V				Permensos Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	TW 3
57	Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial	Dinas Sosial	Pemkes		V				TW 4
58	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, emberian Kuasa dan Penunjukkan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes			V		Kebutuhan untuk percepatan pelayanan administrasi kepegawaian	TW 1
59	Tata cara pengusulan pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali PNS dari dan dalam jabatan fungsional	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Tertib Administrasi dan Pegelolaan Jabatan Fungsional	TW 1
60	Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Prov DKI Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Tindak Lanjut dari hasil validasi dan persetujuan KEMENPAN RB atas standar kompetensi teknis jabatan pimpinan Tinggi	TW 2
61	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti PNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes			V		Penyesuaian terhadap perubahan ketentuan mengenai cuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	TW 2
62	Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS dan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
63	Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS dan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
64	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes			V		Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang memberikan jenis penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
65	Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes			V		Menyesuaikan perkembangan kebutuhan Pengelolaan PJJLP serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	TW 4
66	Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes				V	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	TW 4
67	Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Pemerintah	TW 4
68	Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	TW 4
69	Peraturan Gubernur tentang Pola Karier	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes	V				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	TW 4
70	Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemkes			V		Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	TW 4
71	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Biro ORB	Pemkes		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
72	Jam Kerja dan Kehadiran PNS	Biro ORB	Pemkes		V			Penegakkan disiplin dan peningkatan profesionalitas dan kinerja PNS	TW 3
73	Tata Cara Pengisian Pejabat Pelaksana	Biro ORB	Pemkes		V			Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 4
74	Mutasi Pegawai	Biro ORB	Pemkes		V			Tertib Administrasi dalam pengelolaan mutasi pegawai	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
75	Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov DKI Jakarta	Biro ORB	Pemkes		V			Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	TW 1
76	Pedoman Ruang dan Sarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov DKI Jakarta	Biro ORB	Pemkes		V			Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PEMDA	TW 1
77	Tata Naskah Dinas	Biro ORB	Pemkes		V			Penyesuaian dengan NDE	TW 1
78	Perubahan Atas Pergub Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik	Biro ORB	Pemkes			V		Perubahan alur kerja NDE	TW 2
79	Peraturan Gubernur tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	Biro ORB	Pemkes			V		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Target Selesai B03
80	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan	Biro ORB	EKU		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020	TW 1
81	Organisasi dan Tata Kerja Badan Palayanan Pengadaan Barang/Jasa	Biro ORB	EKU		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 1
82	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro ORB	Pemkes		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
83	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	Biro ORB	Pemkes		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 2
84	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Biro ORB	EKU		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	V
85	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Biro ORB	EKU		V			1. Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	V
86	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Biro ORB	EKU		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	TW 3

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
87	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Biro ORB	EKU		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	
88	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Biro ORB	Pemkes		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	
89	Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah	Biro ORB	Pemkes		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
90	Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah	Biro ORB	Pemkes		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	
91	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	Biro ORB	Banglih		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p>	
92	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan	Biro ORB	Pemkes		V			<p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
93	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Biro ORB	Pemkes		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	TW 4
94	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	Biro ORB	Pemkes		V			Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 4
95	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Biro ORB	Banglih		V			Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021	TW 4
96	Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan	Biro ORB	Pemkes		V			Formasi Jabatan Fungsional khususnya arsiparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina	TW 1
97	Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi terkait ketenagalistrikan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	TW 1
98	Formasi Jabatan Fungsional	Biro ORB	Pemkes		V			Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 1
99	Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Sosial	Biro ORB	Pemkes		V			Formasi Jabatan Fungsional khususnya arsiparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
100	Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut pada Sekretariat DPRD	TW 1
101	Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut ada biro hukum	TW 1
102	Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi belum dibentuk di Pemprov DKI , selain itu untuk mendukung kinerja bidang jasa konstruksi yang akan dibentuk, dikarenakan pembentukan bidang jasa konstruksi juga sudah di amanatkan di permendagri	TW 1
103	Formasi Jabatan Fungsional Sandiman	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi jabatan fungsional sandiman dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sandi yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	TW 1
104	Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Biro ORB	EKU	V				Formulir Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis terkait pengujian barang dan bahan teknik serta pengujian kerajinan dan terkait tekstil yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Menengah	TW 1
105	Formasi Jabatan Fungsional	Biro ORB	EKU		V			Dikarenakan terdapat jabatan fungsional baru yang dibutuhkan di lingkungan dinas Tenaga Kerja, Tranmigrasi dan Energi yakni penguji K3, JF dimaksud dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi UPT Pusat Hyperkes dan KK	TW 1

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
106	Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Biro ORB	Pemkes			V		Adanya perpindahan rumpun jabatan pelaksana Kepala Satpol PP Kelurahan yang sebelumnya berada di Teknis Ahli beralih menjadi rumpun Kepala Satuan Pelaksana	TW 3
107	Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang/bagian hukum yang ada pada tingkat walikota an Sekretariat DPRD	TW 4
108	Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Biro ORB	Pemkes			V		Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
109	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Biro ORB	Pemkes			V		Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
110	Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara	Biro ORB	Pemkes		V			Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
111	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Biro ORB	Pemkes			V		Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini	TW 4
112	Formasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Daerah dan Pusat	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Analisis keuangan Pusat dan Daerah dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan dan anggaran yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	TW 4
113	Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Biro ORB	Pemkes		V			Dikarenakan Permenpan lama terkait Pamong Budaya telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No.7 Tahun 2020, selain itu adanya pemecahanan perangkat daerah dari Disparbud menjadi Dinas Kebudayaan dan Disparekraf	TW 4
114	Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup	Biro ORB	Banglih		V			Dikarenakan Permenan lama terkait Pengendali Dampak Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No. 30 Tahun 2019, selain itu adanya Jabatan Fungsional baru yakni Penyuluh Lingkungan Hidup	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
115	Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Penangkulanga Kebakaran dan Penyelamatan	Biro ORB	Pemkes	V				Formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan kebakaran dan penanggulangan bencana yang ada pada dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	TW 4
116	Pola Organisasi Perangkat Daerah	Biro ORB	Pemkes	V				Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	TW 4
117	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	Biro ORB	EKU		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
118	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Biro ORB	EKU		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
119	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Biro ORB	EKU		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
120	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Biro ORB	EKU		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
121	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	Biro ORB	Pemkes		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
122	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Biro ORB	Banglih		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
123	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Biro ORB	Banglih		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
124	Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Biro ORB	Banglih		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
125	Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah	Biro ORB	Pemkes		V			Evaluasi Kelembagaan	TW 4
126	Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta	Biro ORB	Pemkes	V				Evaluasi Kelembagaan	TW 4
127	Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				1 Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (8) Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2. Sebagai dasar hukum untuk standar sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung	TW 1
128	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				Sebagai dasar hukum untuk mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
129	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Peanggulan Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes			V			TW 3
130	Peningkatan Keselamatan Kebakaran Gedung Pemerintah Daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				Untuk keselamatan kebakaran gedung Pemerintah Daerah	TW 1
131	Organisasi dan Tata Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes		V			1. Menyesuaikan kebutuhan organisasi serta regulasi Peraturan saat ini, antara lain permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkultur Perencanaan 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi Kelembagaan Biro ORB Tahun 2019	TW 3
132	Alat Pelindung Diri dan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				1. Peraturan Menteri aam Negeri Republik Indonesi Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah 2. Permenakertrans Nomor Per 08/Men/V/2010 tentang Alat Pelindung Diri 3. SNI ISO 11999-1:2015 tentang APD Untuk Petugas Pemadam Kebakaran	TW 2
133	Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				Peraturan Menteri Daam Negeri Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	TW 2
134	Mekanisme Pengelolaan APAR untuk masyarakat dan pengelolaan proteksi kebakaran lingkungan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemkes	V				Rujukan Kepmendagri Nomor 364.1-206 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
135	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi di Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes		V			Penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang TSLDU karena adanya temuan BPK	TW 2
136	Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes			V		Pasal 342 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	TW 3
137	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 2
138	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 3
139	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 3
140	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pemkes		V			Implementasi Amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI)	TW 3
141	Transformasi BUMD	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
142	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMD/ PT Patungan	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V				TLHP BPK	TW 2
143	Perubahan Atas Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
144	Perubahan Atas Pergub Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
145	Perubahan Atas Pergub Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
146	Organ BUMD	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V				Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 4
147	Anak Perusahaan BUMD	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V				Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 4
148	Penugasan kepada PT. Jakarta Tourisindo untuk penyelenggaraan dan pengelolaan aktivasi ruang publik, pusat informasi	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
149	organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah pasar jaya	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU		V			Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 1
150	organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU		V			Kebutuhan SKPD/BUMD	TW 1
151	Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V					TW 4
152	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V					TW 5
153	Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Melaksanakan Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Pengelolaan Kawasan Kota Tua	Badan Pembina BUMD (BP BUMD)	EKU	V					TW 6
154	Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan	Pemkes		V			Menyesuaikan dengan Permendikbud terbaru	TW 1
155	Bantuan Peningkatan Mutu Sekolah Swasta	Dinas Pendidikan	Pemkes	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
156	Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Kesiapan Bersekolah SD	Dinas Pendidikan	Pemkes	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
157	Pendidikan Inklusif	Dinas Pendidikan	Pemkes	V				Menyesuaikan Peraturan di atasnya (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)	TW 1
158	Pembinaan Prestasi Berkelanjutan	Dinas Pendidikan	Pemkes	V				Dinas Pendidikan belum memiliki dasar hukum dalam program pembinaan Prestasi berkelanjutan	TW 1
159	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu	Dinas Pendidikan	Pemkes			V			TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
160	Sistem Informasi Penunjuk Arah (wayfinding)	Dinas Perhubungan	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
161	Perubahan Atas Pergub 265/2015 Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Jakarta	Dinas Perhubungan	EKU			V		Pergub 265/2015 perlu dilakukan penyempurnaan	TW 4
162	Penyelenggaraan Ijin Usaha Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	EKU	V				1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	TW 4
			EKU					2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan	
								3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas	
163	Penyelenggaraan Ijin Usaha Angkutan Laut Dalam Provinsi (SIUPAL dalam Provinsi)	Dinas Perhubungan	EKU	V				1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
164	Penyelenggaraan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPELRA)	Dinas Perhubungan	EKU	V				1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	TW 4
165	Penyelenggaraan Ijin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	Dinas Perhubungan	EKU	V				1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan	TW 4
166	Dewan Pengawas Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Dinas Perhubungan	EKU	V				Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD	TW 4
167	Pedoman Pemberian Remunerasi Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	Dinas Perhubungan	EKU	V				Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD dan antisipasi pola penggajian pegawai non PNS yang memiliki kuaifikasi/keahlian yang dibutuhkan	TW 4
168	Penyelenggaraan Jalan berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan	EKU		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik dan pengganti Pergub 25/2017	TW 4
169	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh	Dinas Perhubungan	EKU		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pertimbangan beban kerja organisasi dalam skala operasional/Pengganti Pergub 337 Tahun 2016	TW 4
170	Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan	EKU	V				Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, terkait besaran tarif yang akan diterapkan di sisi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik berikut mekanisme pemungutan	TW 4
171	Standar Pelayanan Minimal Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan	EKU		V			Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pemenuhan standar layanan yang harus diselenggarakan bagi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik/pegganti Pergub 223 Tahun 2015	TW 4
172	Jak Lingko	Dinas Perhubungan	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
173	Tarif bundling	Dinas Perhubungan	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
174	Perubahan Atas Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang bersumber dari APBD kepada PT. Transportasi Jakarta	Dinas Perhubungan	EKU			V		Penyempurnaan Substansi	TW 2
175	Perubahan Atas Pergub Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapit Transit	Dinas Perhubungan	EKU			V		Perpanjangan Kontrak Transjakarta	TW 3
176	Tarif transjakarta	Dinas Perhubungan	EKU			V		Harga tarif tidak relevan saat ini	TW 3
177	Penyelenggaraan Alat Mobilitas Personal	Dinas Perhubungan	EKU	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 2
178	Sepeda Sewa	Dinas Perhubungan	EKU	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
179	Tiket Elektronik AKAP	Dinas Perhubungan	EKU	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
180	Alat Angkut Umum Kayuh	Dinas Perhubungan	EKU	V					TW 3
181	Standar Pelayanan Minimal Terminal	Dinas Perhubungan	EKU	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3
182	Penyelenggaraan Sistem Tiket Elektronik Online Berbasis Aplikasi Jacket Bus sebagai bagian dari Layanan Terminal Antar Kota	Dinas Perhubungan	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah	TW 2
183	Perubahan Atas Pergub tentang Subsidi MRT dan LRT	Dinas Perhubungan	EKU			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 1
184	Percepatan Peningkatan Layanan Adminitrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemkes		V				TW 4
185	Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 1
186	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemkes			V		Perintah Peraturan Perundang-undangan	TW 1
187	Penyediaan dan pemanfaatan taman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Banglih	V					TW 1
188	Pengelolaan dan Perlindungan Pohon	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Banglih	V					TW 1
189	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Banglih	V					TW 1
190	Pemakaman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Banglih	V					TW 3
191	Klasifikasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pemkes				V	Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Klasifikasi, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat	TW 4
192	Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pemkes				V	Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah	TW4
193	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3 dan TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
194	Alih Media dan Digitalisasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pemkes	V				Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)	TW 3 dan TW 4
195	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah 2021	TW 2
196	Visi Pariwisata Urban DKI Jakarta	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	EKU	V				Kegiatan Strategis Daerah 2021	TW 4
197	Insentif Penyelenggaraan MICE	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	EKU	V				Amanat Bab IX Perubahan RPJMD 2017-2022 (Ranhir)	TW 4
198	Pengembangan Pariwisata Halal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	EKU	V				Berdasarkan peringkat negara dengan pariwisata halal terbesar pada IMTI tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama. Jakarta masih berada di peringkat ke empat setelah Lombok, Aceh dan Kepulauan Riau.	TW 4
199	Festival Sepanjang Tahun	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	EKU		V			Kegiatan Strategis Daerah 2020	TW 3
200	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKU			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
201	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Banglih			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
202	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Banglih			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
203	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 Tentang Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Banglih			V		Kegiatan Strategis Daerah	TW 3
204	Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKU		V				TW 4
205	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKU			V			TW 4
206	Pengurangan dan Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	TW 1
207	Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	TW 2
208	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih		V			KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	TW 2
209	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	TW 4
210	Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah pada Usaha dan/atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	Perbal di Biro Hukum sejak 22 Januari 2021

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
211	Pemberian Insetif Fiskal Daerah kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah Melaksanakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	EKU	V				Amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	Perbal di Biro Hukum sejak 28 Januari 2021
212	Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber	Perbal berada di Pak Gubernur per tanggal 26 Februari 2021
213	kolaborasi pengurangan sampah oleh produsen	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih	V				Ranpergub Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	Sudah masuk ke biro hukum, dikembalikan ke Dinas LH pada tanggal 28 Januari 2021 untuk diperbaiki
214	Penetapan Baku Mutu Dan Pengendalian Terhadap Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih		V			KSD 71, baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi DKI Jakarta saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu menetapkan kembali Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	TW 2
215	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup	Banglih			V		Pergub Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	TW 3
216	Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	EKU	V					
217	Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Khusus Daerah	Biro Kesos	EKU						
218	Pengelolaan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Pemkes		V				TW 4
219	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Pemkes						
220	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	EKU			V			TW 4

NO	JUDUL RANPERGUB	NAMA PD/ UKPD	PIC					DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
221	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Banglih			V			TW 4
222	Perluasan Akses Internet Bagi Masyarakat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pemkes	V					TW 4
223	Standar Pelayanan Minimal Pusat Pengembangan Kompetensi Dan Kebijakan Publik	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemkes	V					TW 4
224	Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Complete Street Secara Terpadu	Dinas Bina Marga	Banglih	V					TW 4